

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE SISTEM INFORMASI BERITA TERINTEGRASI (SIBER) DI KABUPATEN KAPUAS

Rika Morla

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
rikamorla@ymail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 2 No : 10 Oktober 2025 Halaman : 11-20	<i>The SIBER application is an information system regarding publications related to infrastructure development, social, economic, cultural and other activities within the Kapuas Regency Government. The SIBER application is related to Kapuas Public Infokom as a media for regional government development. The purpose of this study is to analyze and determine the effectiveness of the implementation of the public information system through the Integrated News Information System (SIBER) website in Kapuas Regency using the DeLone and McLean Model (2003) and to identify the obstacles and supporters of this SIBER application. By using qualitative methods and a case study approach model. Research data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis uses a data analysis model based on the Miles and Huberman Model. This research shows that in blank spot areas, the use of SIBER for all forms of village activity information has been effective. Inhibiting factors include server or network constraints and coverage to remote areas, as well as suboptimal budgets in areas without internet access. This becomes an obstacle in accessing government information, and several villages do not have access to information to connect their activities with the Communication and Information Service (Diskominfo) to monitor all forms of village activities. This research provides input for improving communication channels through internet connection speeds to make it easier for village governments and communities to obtain information about local government and village governments that still have minimal digital literacy.</i>
Keywords: Effectiveness, SIBER, Blankspot	

Abstrak

Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.

Kata Kunci: Efektivitas, SIBER, Blankspot

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan penyelenggaraan pelayanan melalui sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Publik (SIP). Didasarkan pada rencana strategis serta dikelola oleh badan publik yang memiliki visi dan misi dalam mempublikasikan pelayanan administrasi publik. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Publik (SIP) sebagai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi yang disesuaikan

dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada penerapan sistem ini diterapkan secara cepat, mudah, tepat dan efisien.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah saat ini dilakukan dengan berbagai bentuk publikasi baik berupa daring maupun luring. Pelayanan publik yang diberikan berupa informasi dan dokumentasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik individu, sektor swasta ataupun instansi pemerintahan.

Pada peraturan keterbukaan informasi publik tercantum mengenai hak untuk memperoleh informasi sebagai wujud pemerintah memberikan pelayanan yang baik dan hak demokrasi bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas. Diterapkan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum untuk menegakkan hak masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dalam memonitoring dan dilakukannya evaluasi terhadap pembangunan yang dijalankan oleh badan publik.

Pemerintah Kabupaten Kapuas yang merupakan bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami perkembangan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mendukung aksesibilitas administrasi, pengelolaan data internal serta layanan informasi publik maka dilakukan publikasi aplikasi sistem informasi ini. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini juga mengamanatkan untuk melakukan penerapan sistem informasi publik pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2022 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tercantum pada Pasal 1.

Dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Diskominfosantik Kabupaten Kapuas didasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 249/Diskominfosantik Tahun 2024 mengenai Tim Pengelola Layanan Website SIBER Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Diskominfosantik Kabupaten Kapuas dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas memiliki tugas dalam memberikan pelayanan publik melalui pengelolaan dan penyebaran informasi publik agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Aplikasi berbasis website yang diterapkan salah satunya yaitu SIBER ini sebagai sistem informasi yang menyediakan berbagai hal mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Ditambahkan dengan keterangan dari Plt Kepala Diskominfosantik Kabupaten Kapuas yang juga sebagai Chip Informan Operator (CIO) Kabupaten Kapuas menerangkan bahwa dengan diterapkannya aplikasi SIBER seluruh lapisan terlibat dalam berkontribusi mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Aplikasi ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkini mengenai Kabupaten Kapuas mudah diakses melalui situs web dan juga dapat diunduh melalui aplikasi Android dengan memperoleh "KIP News" dari toko aplikasi playstore. (MMCKalteng, 2018)

Dalam penerapan layanan melalui aplikasi sistem informasi public Pemerintah Kabupaten Kapuas terkait dengan bagaimana penerapan sistem informasi publik Kabupaten Kapuas tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan atau desa.

Literatur Review

Penelitian terdahulu adalah referensi tesis dan jurnal dan kemudian dikaji sebagai bahan untuk perbandingan penelitian sebelumnya dan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini ada relevansi terhadap penelitian terdahulu. Heru (2021) PPID pada instansi Diskominfosantik belum berfungsi dengan baik dan diharapkan lebih terbuka. Perlu ada upaya untuk mempromosikan dan melatih masyarakat agar mereka memahami cara meminta informasi melalui sistem PPID. Selanjutnya, Agung (2023) tidak tepat waktu dalam menanggapi Hak Jawab membuat komunikasi di Dinas Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi menjadi kurang efektif. Penelitian Adelia (2023) menguraikan bahwa masih perlu pembenahan dalam hal transparansi oleh Pemerintah Aceh (PPID Utama Aceh) dalam menampilkan proses persidangan Komisi Informasi agar dapat diakses oleh publik dan memberikan transparansi dalam proses persidangan,

Pada jurnal Dori (2015) dengan penggunaan Simpedik dengan tujuan memperluas pengetahuan masyarakat pada Dinas Pendidikan yang adalah solusi yang tepat, efisien dan efektif. Selain itu, penelitian Shintya Kurniawati dan Lailul Mursyidah (2023) terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya berfungsi dengan baik atau mengalami kendala, disebabkan oleh masyarakat yang masih dalam tahap pemahaman penggunaan sistem informasi untuk layanan public secara daring melalui aplikasi, pihak aparat desa yang mengelola beberapa aplikasi juga mengalami kesulitan akibat kurangnya deskripsi pekerjaan yang jelas dan belum adanya standar pelayanan yang ditetapkan serta beberapa aplikasi masih tidak beroperasi sesuai dengan fungsi semula.

Tinjauan Teoritis

Kriteria efektivitas ada 4 hal yang disampaikan oleh David Krech, Richard S. C, dan Egenton L. Ballachey yang dirujuk oleh Sudarwan Danim (2004: 119-120) menjelaskan dengan jumlah hasil yang dihasilkan, tingkat kepuasan yang dicapai, produk kreatif dan tingkat intensitas yang akan dicapai. Sistem informasi yang dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean (1992) merupakan model lebih sering digunakan dalam kajian tentang evaluasi dan pengukuran keberhasilan sistem informasi. Model DeLone dan McLean mengidentifikasi enam dimensi utama dalam menilai keberhasilan sistem informasi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi. DeLone dan McLean (2003) memperbarui model mereka dalam versi yang semakin lengkap, dengan menambahkan dua dimensi baru: kualitas layanan dan manfaat bersih.

Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan dan penerapan sistem informasi publik maka banyak tahapan yang harus dilakukan agar sesuai dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik dengan Sistem Informasi Publik (SIP) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu (1) Pelaksanaan Pelayanan, (2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, (3) Pengelolaan Informasi, (4) Pengawasan Internal, (5) Penyuluhan Kepada Masyarakat, (6) Pelayanan Konsultasi. Dalam penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan website pada Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) dapat mendukung *E-Government* dalam penyelenggaraan layanan publik di Kabupaten Kapuas.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada tahapan ini bertujuan untuk mencari data valid dan relevan, dengan maksud memperoleh data yang selaras dengan tujuan penelitian. Maka tahapan ini masih dalam konteks data sementara dan akan dapat berubah menyesuaikan dengan data temuan baru di lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini akan diupayakan menemukan isu-isu terbaru di lapangan sebagai penunjang data penelitian selanjutnya. Jenis metode kualitatif ini menggunakan model pendekatan studi kasus.

Lokasi penelitian pada Diskominfosantik Kabupaten Kapuas yang berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tujuan peneliti memfokuskan penelitian di instansi terkait ini, sebagai penyelenggara penerapan sistem informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sehingga menjadi patokan bagi penunjang pelayanan publik berbasis digital yang diperuntukan bagi pengguna layanan publik.

Sumber data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dibagi terdapat dua hal berupa data primer dan data sekunder. Data yang dihasilkan dari informan yang berkaitan dengan tahap-tahap perolehan data dan dapat dikatakan sebagai informan kunci. Informan memang mengetahui dan ikut serta dalam kegiatan penerapan informasi publik ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab masalah yang ditemukan di lapangan secara langsung dari narasumber melalui wawancara maupun melalui angket. Pengumpulan data primer dikumpulkan peneliti untuk tujuan

penelitian. Dan data sekunder yang dihasilkan dengan membaca, mempelajari dan memahami media lain berupa dokumen.

Teknik pengumpulan data melalui melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi berupa kondisi dimana adanya tindakan pengamatan secara langsung dari peneliti supaya bisa memahami konteks data secara keseluruhan pada situasi sosial agar memperoleh sudut pandang yang holistik. Wawancara adalah perkumpulan dua individu dengan tujuan saling memberikan informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan dokumentasi adalah pengumpulan dari catatan peristiwa yang telah berlaku baik berupa tulisan, gambar (foto) atau karya-karya monumental dari seseorang atau instansi.

Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman menjadi tiga tahapan. Pertama, reduksi data dengan melibatkan penyederhanaan atau kondensasi data agar selaras dengan persyaratan penelitian spesifik dan memfasilitasi ekstraksi informasi. Kedua, melanjutkan ke tahap penyajian data atau data display. Di fase ini, data yang sudah direduksi atau dilakukan penyederhanaan pada tahap terdahulu akan disajikan oleh peneliti. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti grafik, diagram, pictogram dan variasi lainnya. Dan ketiga, proses penarikan Kesimpulan dengan data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dengan metode atau pola tertentu yang memungkinkan kesimpulan diambil.

Teknik Keabsahan data maka untuk memastikan kualitas data, digunakan triangulasi sumber, yaitu pendekatan yang mengharuskan peneliti untuk mengidentifikasi lebih dari satu sumber demi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data atau informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibukota Kabupaten Kapuas Adalah Kuala Kapuas. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 233 desa. Kabupaten Kapuas berstatus sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang mengatur Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.

Secara geografis, Kabupaten Kapuas memiliki dua ciri wilayah, yaitu daerah di bagian selatan dengan karakteristik pasang surut (12 kecamatan) dan daerah di bagian utara yang memiliki karakteristik non-pasang laut (5 kecamatan). Kabupaten Kapuas terdapat beberapa kecamatan dan juga desa yang saling berkontribusi dalam memajukan pembangunan terutama melalui layanan digital yang berbentuk sistem informasi publik. Kabupaten Kapuas memiliki visi dan misi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di masa depan dengan slogan yaitu "Kapuas BERSINAR" (BERdaya saing, Sejahtera, Indah, Aman dan Religius).

Secara administratif, Kabupaten Kapuas merupakan salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penduduk Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 sebesar 425,19 ribu jiwa. Dari total penduduk tersebut, 51,53 persen berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 48,47 persen penduduk Kapuas berjenis kelamin Perempuan. Kemudian, 23,07 persen berusia antara 0 dan 14 tahun, 71,10 persen antara 15 dan 64 tahun, sementara 5,86 persen penduduk Kapuas berusia 65 tahun ke atas.

Kabupaten Kapuas terbagi dalam 17 kecamatan, yaitu Kapuas Kuala, Tamban Catur, Kapuas Timur, Selat, Bataguh, Basarang, Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung, Dadahup, Kapuas Barat, Mantangai, Timpah, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu dan Mandau Talawang. Dengan total penduduk Kabupaten Kapuas sebesar 425.186 jiwa.

Desa Pulau Telo Kecamatan Selat

Dalam penelitian ini mengambil dua lokasi desa untuk menemukan gambaran tentang penerapan SIBER di Kabupaten Kapuas, untuk dapat mendapatkan konteks yang berbeda terhadap dua desa ini. Beberapa cakupan lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis diantaranya Desa Pulau Telo sebagai desa cerdas dan Desa Sakalagun yang termasuk salah satu desa tak terjangkau.

Kecamatan Selat memiliki 10 (sepuluh) desa atau kelurahan yaitu Murung Keramat, Selat Hilir, Selat Tengah, Selat Hulu, Selat Dalam, Pulau Telo, Panamas, Selat Barat, Selat Utara dan Pulau Telo Baru.

Untuk menuju Desa Pulau Telo dapat melalui sara transportasi jalur darat. Adapun satu desa yang termasuk dalam desa cerdas ialah Pulau Telo yang termasuk dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat berbasis digital. Jarak dari Kecamatan Selat menuju desa atau kelurahan Pulau Telo sekitar 3 km sedangkan menuju Kabupaten Kapuas sekitar 8 km. Luas Desa Pulau Telo adalah 1,47 km² dengan persentase terhadap luas kecamatan adalah 2,32. Jumlah Rukun Warga tidak ada dan untuk Rukun Tetangga sebanyak 7 (tujuh).

Desa Sakalagun Kecamatan Pulau Petak

Desa Salagun menjadi salah satu desa di Kecamatan Pulau Petak yang termasuk kesulitan sinyal internet termasuk pada 35 (tiga puluh lima) titik blankspot yang tidak terjangkau. Untuk prasarana dan sarana transportasi yang digunakan untuk menuju Desa Sakalagun ini dapat melalui jalur darat dan air.

Desa Pulau Telo termasuk desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Selat. Desa Sakalagun termasuk dalam Kecamatan Pulau Petak. Untuk Lokasi dari dua desa ini yang akan mewakili kondisi infrastruktur dan penerapan sistem informasi publik SIBER yang memiliki implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing desa.

Sistem Informasi Publik di Kabupaten Kapuas

Konten Berita SIBER

Materi yang disebarluaskan berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, Pendidikan, ekonomi, budaya sosial, spiritualitas, Kesehatan mental dalam lingkup keluarga, lingkungan, pariwisata serta bidang transportasi dan telekomunikasi dan lain sebagainya. Dalam mendukung sektor Pembangunan melalui saluran pemberitaan yang digunakan sistem informasi publik melalui SIBER berisikan konten-konten.

Sasaran Pemberitaan

Sasaran pemberitaan dalam penerapan Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas berfokus pada penyebaran informasi yang cepat, tepat, akurat, transparan dan berdayaguna bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan melakukan penyebaran informasi publik yang cepat dan tepat, pembentukan satgas anti hoax, meningkatkan literasi digital, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta bersinergi dengan badan siber dan sandi negara untuk keamanan sistem.

Kualitas Sistem

Manfaat dari penggunaan sistem informasi secara digital akan mempermudah dalam pengambilan keputusan, meningkatkan layanan publik, melindungi keamanan data dan meningkatkan kinerja organisasi. Bapak HUS selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER), mengemukakan bahwa:

"Medianya ada website, kemudian di media ini ada media online, media cetak dan media visual. Untuk website Diskominfo ada Kapuas Infokom Publik (KIP) dalam satu hari bisa 4 sampai 5 berita informasi yang kami sampaikan. Kemudian untuk pembuatan aplikasi, konten-konten yang lainnya melalui sosial media. KIP termasuk dalam pengelolaan PPID. Sistem informasinya berbentuk website KIP yang dalam bentuk pelayanan juga. KIP tidak hanya di Diskominfo saja tetapi semua OPD ada pengelolanya masing-

masing. Jadi, ada setiap ada informasi laporan dan sebagainya itu setiap OPD langsung menjawab. Ketika menjawab indikator nilainya masuk PPID yang mendapat anugerah untuk se-Kalimantan Tengah yang informatif masuk peringkat kedua terhadap Keterbukaan Informasi Publiknya.”

Berdasarkan teori menurut DeLone dan McLean dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemerintah sudah menerapkan SIBER sebagai sarana informasi segala bentuk kegiatan. Dan kualitas yang disajikan dari keandalan, kecepatan, kemudahan, penggunaan dalam penggunaan sistem ini namun masih terdapat beberapa desa yang masih belum terjangkau jaringan.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang tidak berjalan dengan baik akan mempengaruhi dalam penerapan sistem informasi. Seperti dukungan terhadap kemudahan akses terhadap pengguna, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengelola sistem informasi, serta penggunaan terhadap sistem. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak GM selaku Sekretaris Tim Pengelola Layanan Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) mengatakan bahwa:

“Biasanya di pengaduan ada bintangnya untuk menilai sudah terpenuhi dan sudah puas.”

Berdasarkan teori dari DeLone dan McLean (2003) dengan hasil yang ditemukan bahwa kualitas layanan melalui beberapa hal yaitu jaringan pada aplikasi SIBER terkadang terjadi gangguan sistem, terdapat layanan LAPOR yang tercantum di website, komunikasi antara operator sistem informasi dan pengguna berjalan dengan baik dan manfaat literasi digital membantu masyarakat dalam penggunaan website SIBER.

Kualitas Informasi

Kualitas informasi yang diberikan maka disampaikan oleh Bapak MII selaku Kepala Desa Pulau Telo Kabupaten Kapuas, menyatakan bahwa:

“Langsung dari websitenya karena selama ini bagus saja saya melihat kualitas kontennya. Artinya, yang kami gunakan sesuai dan tidak ada yang tidak sesuai. Bertujuan untuk memberikan transparansi dan lain sebagainya.”

Berdasarkan keterangan ini menyatakan bahwa kualitas informasi yang diberikan melalui aplikasi atau website SIBER sudah terbilang baik yang dibagikan oleh Badan Publik.

Penggunaan dan Kepuasan Pengguna

Dalam lingkup pemerintahan hal ini mengungkapkan penerapan sistem informasi ini masih dalam tahap pembenahan untuk di daerah yang tidak terjangkau (*blankspot*) oleh fasilitas infrastruktur jaringan internet. Hal ini disampaikan oleh Bapak GM selaku Sekretaris Tim Pengelola Layanan Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) mengatakan bahwa:

“Sangat bermanfaat khususnya untuk wartawan untuk masyarakat mendapat informasinya melalui sistem itu. Kalo untuk PPID untuk orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Kita masih belum ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi di lapangan. Jadi, untuk masyarakat di tingkat menengah ke bawah belum paham dalam penggunaannya. Kalau untuk form pengaduan mungkin sudah paham saja. Karena melalui Videotron sering ditampilkan. Pengaduan secara online biasanya dan secara offline termasuk jarang. Biasanya kami meminta terkait dokumentasi kegiatan saja.”

Pengguna mengacu pada sejauh mana sistem informasi digunakan oleh para pengguna untuk keperluan yang dimaksudkan. Berdasarkan teori dari Delone dan Mclean dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa sesuai dengan data statistik pengunjung bulanan pada website SIBER dari bulan Juli 2024 hingga Juni 2025 terdapat paling banyak pengguna berjumlah 142.197 pembaca.

Manfaat Bersih

DeLone dan McLean merevisi model tersebut dengan menggabungkan dua konstruk, yaitu *individual impact* dan *organizational impact*, menjadi satu konstruk baru bernama *net benefit* (manfaat bersih). Manfaat bersih ini meliputi, (a) Mengingkatkan terhadap layanan publik melalui segala bentuk informasi yang disediakan pada website SIBER, (b) Meningkatkan produktivitas kinerja badan publik terhadap layanan publik karena website SIBER sebagai wadah monitoring kegiatan pemerintahan, (c) Pengguna dapat berkontribusi dalam pemberian masukan dan keluhan melalui informasi yang diterima terhadap layanan publik yang kurang prima, (d) Menunjang dan mempermudah segala bentuk pengambilan keputusan kedepannya.

Faktor-Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penelitian ini menjelaskan bahwa semua yang mendukung, membantu, mempermudah, mempercepat segala proses kegiatan yang dilakukan. Faktor yang berkaitan dengan perihal dalam penerapan sistem informasi publik melalui website SIBER penyelenggaraan pelayanan yaitu, (1) Sumber daya yang cukup berupa staf berkompeten dan memahami dalam memberikan bimbingan teknis terkait penerapan sistem informasi SIBER kepada OPD, Kecamatan dan Kelurahan. (2) Kebijakan daerah yang melibatkan pemangku daerah untuk penerapan sistem informasi publik. (3) Infrastruktur komunikasi dan perangkat keras seperti PC, Wifi dan Starlink telah tersedia di beberapa titik lokasi.

Faktor-Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dijelaskan pada penelitian ini merupakan segala bentuk hambatan dan kendala terhadap penerapan sistem informasi publik melalui website SIBER Di Kabupaten Kapuas. Dalam hal penerapan sistem informasi ini sudah berjalan efektif atau tidaknya yang akan menjadi faktor penghambat pelaksanaan penerapan ini.

Sekretaris Tim Pengelola Layanan Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) mengatakan kelemahannya pada internet yang ada 34 titik desa yang masih blankspot. Jadi tidak bisa mengakses sama sekali. Untuk di perangkat daerah sudah kita laksanakan cuman di pedesaan masih belum dilakukan literasi digital (wawancara, 23 Mei 2025).

Dari sisi pimpinan, Bapak HUS selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) yang mengemukakan tantangan dan hambatan itu sebenarnya beranekaragam karena setiap Diskominfo berbeda-beda. Terkait dengan keterbatasan sumber daya manusianya, anggaran karena ada dua dinas yang tidak seimbang. Karena kalau fokus pengurusan PU maka anggaran akan berkurang dibandingkan dengan Diskominfo. Padahal dua dinas ini merupakan bidang-bidang teknis semua. PU terkait dengan pembangunan infrastruktur terkait dengan jembatan, jalan dan sebagainya. Diskominfo membutuhkan anggaran yang sama. Apalagi sudah masuk era digital. Karena ini terkait dengan sumber daya manusia, penganggaran, sistem dan lain sebagainya. Tidak ada yang gratis karena aplikasi dengan mengajak konsultan membutuhkan biaya. Karena di daerah lain sudah menggunakan fiber optik. Untuk ditempat kita masih belum bisa menggunakan fiber optik karena tidak dianggarkan sama sekali. Begitu juga kalau dari desa meminta BTS dan kami hanya memfasilitasi usulan dari desa dan kemudian dilanjutkan ke pusat (wawancara, 21 Mei 2025).

Secara umum, yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi publik melalui website SIBER yaitu kelemahan terhadap akses internet yang masih belum dapat menjangkau daerah terpencil, kemudian dikarenakan kendala terhadap sumber daya manusia yang membutuhkan bimbingan teknis terkait pengelolaan website, serta kesiapan dari seluruh badan publik yang ada di Kabupaten Kapuas terhadap kesiapan memasuki era yang serba digital ini.

PEMBAHASAN

Dari uraian diatas Pada penelitian ini kualitas sistem ditentukan oleh seberapa jauh pemerintah memahami dan melakukan tindakan terhadap penerapan sistem informasi publik. Berdasarkan teori menurut DeLone dan McLean dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemerintah sudah menerapkan SIBER sebagai sarana informasi segala bentuk kegiatan. Dan kualitas yang disajikan dari keandalan, kecepatan, kemudahan, penggunaan dalam penggunaan sistem ini namun masih terdapat beberapa desa yang masih belum terjangkau jaringan. Sehingga kemudahan dalam mengakses bagi pengguna masih belum sesuai dengan kondisi beberapa desa. Sehingga informasi publik kepada masyarakat belum tersampaikan dengan maksimal.

Ditemukan bahwa kualitas layanan melalui beberapa hal yaitu jaringan pada aplikasi SIBER terkadang terjadi gangguan sistem, terhadap respon pengaduan masyarakat terdapat layanan LAPOR tercantum yang tercantum pada halaman website, komunikasi antara operator sistem informasi dan pengguna berjalan dengan baik serta disediakan panduan dalam penggunaan website KIP, penyebaran informasi untuk memberikan manfaat literasi digital membantu masyarakat dalam penggunaan website SIBER, baik melalui media sosial dan Videotron.

Kualitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap satu hingga tiga bulan. Keakuratan informasi berupa informasi yang dibagikan berdasarkan fakta dilapangan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk jumlah berita yang dibagikan dalam satu bulan bisa dibagi menjadi tiga kali dalam sehari. Relevansi dari informasi yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan pengguna terkait dengan pembangunan jembatan, kegiatan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kegiatan lainnya. Kelengkapan untuk setiap berita yang dibagikan diberikan judul, dokumentasi, tanggal dan ringkasan yang jelas. Kemudahan dalam informasi yang dibagikan mudah dipahami melalui bahasa yang baik dan benar.

Manfaat bersih ini meliputi meningkatkan terhadap layanan publik melalui segala bentuk informasi yang disediakan pada website SIBER, meningkatkan produktivitas kinerja badan publik terhadap layanan publik karena website SIBER sebagai wadah monitoring kegiatan pemerintahan, pengguna dapat berkontribusi dalam pemberian masukan dan keluhan melalui informasi yang diterima terhadap layanan publik yang kurang prima, serta menunjang dan mempermudah segala bentuk pengambilan keputusan kedepannya.

Faktor penghambat yang dijelaskan pada penelitian ini merupakan segala bentuk hambatan dan kendala terhadap penerapan sistem informasi publik melalui website SIBER Di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi faktor penghambat penerapan aplikasi SIBER ini yaitu, (1) Anggaran yang belum optimal untuk menjangkau beberapa daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Sehingga menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan. (2) Beberapa desa yang jaringan lambat terkoneksi serta tidak memiliki website tersendiri untuk terhubung segala bentuk kegiatan pada website SIBER agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa.

KESIMPULAN

Penerapan sistem informasi publik melalui sistem berita terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas yang diteliti di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas, Desa Pulau Telo dan Desa Sakalagun telah berlangsung dengan baik. Berdasarkan hal di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam pelaksanaan sistem informasi sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang terdokumentasi dalam sosialisasi KIP atau SIBER, PPID dan Laporan. Dari enam indikator yang digunakan, lebih dominan memberikan hasil yang efektif dalam penerapan sistem informasi ini. Beberapa hal yang mendukung dalam penerapan yaitu pelatihan, sosialisasi dan evaluasi berkala setiap satu tahun sekali terhadap beberapa operator pelaksana baik di OPD dan juga kecamatan.

Sumber daya yang cukup berupa staf berkompeten dan memahami dalam memberikan bimbingan teknis terkait penerapan sistem informasi SIBER kepada OPD, Kecamatan dan Kelurahan. Kebijakan daerah yang melibatkan pemangku daerah untuk penerapan sistem informasi publik. Infrastruktur komunikasi dan perangkat keras seperti PC, Wi-fi dan Starlink telah tersedia.

Faktor penghambat penerapan sistem informasi ini ditemukan pada tiga aspek utama, yaitu kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah-daerah terpencil. Anggaran yang belum optimal untuk menjangkau beberapa daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Sehingga menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan. Dan beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi melalui website untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa.

Sebagai masukan untuk kedepan selanjutnya sebagai pengembangan dan pembenahan Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas selanjutnya agar tepat sasaran dan bermanfaat adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat di sekitar dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah.

Sebagai Tim Layanan SIBER mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas serta fungsi dalam penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan layanan informasi, pengaduan, dan humas dari keberhasilan suatu program pada Perangkat Daerah. Dan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi di pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.

REFERENCES

- Alis, Siti., Umam, Khaerul., Putri, A. Cinta. (2023). *E-Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi)*. (n.p.): Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.
- Agung, A. F. (2023). Efektivitas Komunikasi Organisasi Pada Penyelesaian Hak Jawab Berita Di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 5(01), 30-44.
- Ananda, A. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Aceh* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Chazienul, U. Mochamad. (2108). Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik. (2018). (n.p.): Universitas Brawijaya Press.
- Dunia Dosen, "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian". [Online]. Available: <https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>. [Accessed: 24-03-2025]
- Erwin, E. dkk. (2024). "Sistem Informasi Manajemen: Teori, Prinsip dan Penerapan" (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitrah, M. dkk. (2017). "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus." (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).
- Gita, E. Jessica. (2025). "Manfaat Sistem Informasi: Studi Penerapan" (n.d.). (n.p.): (n.p.): Penerbit Adab.
- Herawati, Anita. Oktavianoor., Husda. (2022). Buku Ajar Pengantar Demografi. (n.p.): Penerbit NEM.
- Hidayat, A. Bachtari, dkk. (2024). "Kajian Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik Sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2020". (n.d.). (n.p.): Penerbit Adab.
- Indonesia.go.id, "Sistem Informasi Pelayanan Publik". [Online]. Available: <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/749/sistem-informasi-pelayanan-publik-sipp?lang=1> [Accessed: 24-03-2025]
- Jasrianto, D., Taufiq, A., & Sulistyowati, S. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpindik) Di Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Journal Of Politic and Government Studies*, 5(4), 91-100.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “*E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi*.” [Online]. Available: https://www.setneg.go.id/baca/Index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi [Accessed: 23-03-2025]
- Kurniawati, S., & Mursyidah, L. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo. *Musamus Journal Of Public Administration*, 6(1), 613-630.
- Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. (2018). (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).
- MMCKalteng. (2018). *Bupati Resmikan Aplikasi SIBER*. [Online]. MMCKalteng. Diakses pada [29-06-2025], <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/3245/bupati-resmikan-aplikasi-siber>
- Nasution, S. (1996). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- PPID Kabupaten Kapuas, “Tugas dan Wewenang PPID Kabupaten Kapuas”. [Online]. Available: <https://ppid.kapuaskab.go.id/profil>. [Accessed: 13-03-2025]
- PPID NTB, “*Sekilas Tentang PPID*”. [Online]. Available: <https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-11-sekilas-tentang-ppid.html>. [Accessed: 13-03-2025]
- Sutabri, Tata. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. (n.d.). (n.p.): Penerbit Andi. 43-46
- Setiawan, M. H. (2021). Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi Ppid Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(1), 50-68.
- Zulkifli, “*Diskominfo Kapuas Kembangkan Aplikasi SIBER*”. [Online]. <https://www.metrokalimantan.com/2020/01/diskominfo-kapuas-kembangkan-aplikasi.html> [Accessed: 07-07-2025]